BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara, termasuk Indonesia, pasti memiliki tujuan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan secara umum dapat diartikan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki suatu negara baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Jadi pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha pokok untuk mengubah keadaan saat ini ke keadaan yang lebih baik guna mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi sangat penting bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya, dengan mengembangkan segala bidang kegiatan di negara tersebut. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk bersama-sama mengambil prakarsa pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah bersama partisipasi masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk merancang dan mengembangkan perekonomian daerah (Zulkarnain, 2018:56). Dengan dilaksanakannya otonomi daerah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mencapai tuntutan masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat dicapai apabila

pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program-program seperti peningkatan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan penyediaan kesempatan kerja yang memadai.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dll. dan faktor non-ekonomi seperti institusi sosial, kondisi politik dan pertumbuhan ekonomi, yang biasanya tercermin dalam Produk Domestik (PDB). Salah satu acuan untuk memprediksi keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian suatu negara atau kota dalam produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi adalah ketika kondisi perekonomian berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Walaupun demikian, pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk menstabilkan prekonomian di Indonesia. Kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal. Berikut ini tabel laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi periode 2019 sampai 2023 disajikan dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
Tahun 2019-2023 (%)

Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Kerinci	4,23	3,81	3,89	4,43	5,73	4,42
Merangin	4,25	0,78	5,24	5,72	5,28	4,25
Sarolangun	4,26	(0,25)	6,61	6,73	4,02	4,27
Batang Hari	5,07	(0,43)	4,85	12,27	3,70	5,09
Muaro Jambi	4,79	0,35	3,96	8,05	6,28	4,67
Tanjung jabung Timur	4,21	(3,44)	0,14	0,57	2,17	0,73
Tanjung jabung Barat	5,01	(0,29)	1,36	2,56	3,51	2,43
Tebo	4,76	(0,03)	4,29	6,29	4,50	3,96
Bungo	4,19	(0,48)	4,99	4,73	4,66	3,62
Kota Jambi	4,73	(4,24)	4,13	5,38	6,61	3,32
Sungai Penuh	5,01	(0,16)	3,67	4,44	4,92	3,58

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 dilihat bahwa Perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan di setiap tahun, perkembangan laju pertumbuhan PDRB terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar (108,67%), hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 wabah covid 19 melanda seluruh negara dan termasuk Indonesia, yang mengakibatkan dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 880,00%. Tercatat bahwa rata-rata perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi meningkat sebesar 199,28%.

Kajian konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi menyebutkan bahwa ada beberapa variabel ekonomi yang mempengaruhi pendapatan nasional. Formula ini disebut pengakuan pendapatan nasional (Saputra et al., 2020), berikut Variabel ekonomi yang peneliti yang digunakan: (1) Belanja

Modal, (2) Tenaga Kerja, (3) Indeks Pembangunan Manusia adalah sebaga Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah/kota di Provinsi Jambi.

Bentuk investasi pemerintah dapat dilihat dari belanja daerah yang dialokasikan. Belanja daerah didistribusikan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk membiayai kegiatan atau program di daerah, khususnya belanja modal. Belanja modal sebagai bagian belanja langsung pada belanja daerah difokuskan untuk menambah kekayaan dan aset daerah serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat (Rahmadi et al., 2022:74). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari periode akuntansi, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal di dalam APBD untuk menambah asset tetap (Handayani et al., 2017:112). Infrastruktur juga memiliki dampak penting terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses lapangan kerja, serta peningkatan kekayaan riil (Handayani et al., 2017:112).

Dampak infrastruktur dalam berbagai aspek: daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, output, produktivitas tenaga kerja, dampak dan manfaat lingkungan (penghematan waktu dan biaya, peningkatan keamanan, pengembangan jaringan informasi) (Bristow dan Nellthorp, 2010:45). Selain itu, belanja modal seperti pembangunan infrastruktur akan mendorong sektor riil, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan konsumsi pemerintah dan masyarakat, serta dapat mendorong peningkatan kegiatan produksi karena infrastruktur yang memadai akan mengurangi biaya produksi, terutama terkait

bahan bakar. sehingga biaya tersebut dapat ditekan (Dewi, 2021:90)

Tabel 1.2
Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
2019-2023 (Miliyaran Rupiah)

Kabupaten/Kota	Belanja Modal					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Kerinci	294.611	159.734	176.683	138.624	144.193	182.769,0
Merangin	211.188	208.241	229.728	294.674	251.430	239.052,2
Sarolangun	218.170	215.169	414.970	247.728	164.762	252.159,8
Batang Hari	186.017	148.206	298.957	150.464	195.867	195.902,2
Muaro Jambi	391.872	295.278	332.194	252.778	279.926	310.409,6
Tanjung jabung Timur	194.063	322.956	338.872	249.225	273.272	275.677,6
Tanjung jabung Barat	301.456	408.657	667.230	343.968	247.631	393.788,4
Tebo	232.046	248.990	259.093	159.855	199.402	219.877,2
Bungo	127.650	203.211	234.629	153.987	100.485	163.992,4
Kota Jambi	386.025	469.333	432.100	444.351	742.653	494.892,4
Sungai Penuh	168.865	194.683	176.535	134.644	151.942	165.333,8

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2024

Berdasarkan tabel 1.2 perkembangan belanja modal Kabupaten/kota Provinsi Jambi berfluktuasi disetiap tahunnya. Pada tahun 2021 perkembangan rata-rata belanja modal Kabupaten/kota Provinsi Jambi tertinggi sebesar 23,88% dan perkembangan belanja modal Kabupaten/kota Provinsi Jambi terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar (27,82%) dengan rata perkembangan meningkat sebesar 2,28%.

Secara umum pemerintah daerah berkewajiban untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dengan mengalokasikan anggaran belanja publik lebih tinggi untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti belanja yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pelayanan publik contohnya belanja modal untuk pembangunan sekolah dan rumah sakit. Dengan meningkatkan pelayanan

publik maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja perekonomian. Anggaran pemerintah yang terserap dengan efektif dan efisien merupakan proses pelayanan publik yang menjadi tujuan nasional yang paling utama.

Faktor jumlah angkatan kerja merupakan salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja merupakan gambaran kondisi lapangan kerja yang tersedia. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia maka produksi total di suatu daerah akan meningkat dan hal ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ollyviana, 2016:55). (Monada, 2022:15) menunjukkan bahwa tenaga kerja adalah modal negara sebagai persentase dari total angkatan kerja. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi angkatan kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tenaga kerja merupakan salah satu isu penting di dalam perekonomian suatu negara. Tenaga kerja adalah setiap orang/individu/masyarakat yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi, suatu input atau sumber daya (sumber daya alam (SDA), Sumber daya manusia (SDM) dan modal) sangat dibutuhkan untuk menghasilkan output, sehingga perekonomian dapat berkembang.

Tabel 1.3
Jumlah Tenaga Kerja Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2019-2023 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja (Bekerja)					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Kerinci	119.958	127.187	130.965	136.320	137.302	130.346,4
Merangin	186.863	190.731	192.138	193.723	186.400	189.971,0
Sarolangun	134.967	141.752	137.204	143.965	136.619	138.901,4
Batang Hari	114.399	128.274	132.611	124.787	138.564	127.727,0
Muaro Jambi	183.418	194.705	202.878	222.447	220.545	204.798,6
Tanjung jabung Timur	112.079	119.896	115.517	119.088	117.848	116.885,6
Tanjung jabung Barat	165.862	179.842	179.622	172.109	166.336	172.754,2
Tebo	175.417	180.517	181.524	183.165	177.198	179.564,2
Bungo	166.055	168.517	168.355	183.631	185.999	174.511,4
Kota Jambi	283.575	265.205	262.974	276.359	285.317	274.686
Sungai Penuh	40.982	42.377	43.052	42.225	50.136	43.754,4

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2024

Berdasarkan tabel 3 perkembangan jumlah tenaga kerja di Kabupaten/kota Provinsi Jambi berfluktuasi disetiap tahunnya. Pada tahun 2023 perkembangan rata-rata jumlah tenaga kerja di Kabupaten/kota Provinsi Jambi terendah sebesar 0,25% dan perkembangan jumlah tenaga kerja di Kabupaten/kota Provinsi Jambi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,29% dengan rata perkembangan meningkat sebesar 1,78%.

Indeks pembangunan manusia diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan HDR (Human Development Report) (Badan Pusat Statistik, 2022). Indeks pembangunan manusia (IPM) atau dikenal dengan Human Development Index (HDI) merupakan tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas manusia disetiap daerah.

Indeks pembangunan manusia digunakan untuk menilai pencapaian kualitas pembangunan manusia sehingga dapat mengarah pada taraf hidup yang lebih tinggi sehingga dapat berperan penting dalam menyambut pertumbuhanekonomi

daerah dalam hal ini produk domestik bruto Kabupaten/Kota di provinsi Jambi. Tiga pilar utama untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pendidikan kesehatan dan peningkatan daya beli. Indeks pembangunan manusia merupakan komponen penting untuk mengukur keberhasilan dalam usaha membangun kualitas hidup manusia yang mencakup tiga dimensi dasar yaitu: sosial, kesehatan, dan ekonomi. (Herinoto et al., 2021:10).

IPM merupakan salah satu faktor penting dalam kinerja perekonomian daerah yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang sehingga dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Indeks pembangunan manusia memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi modern karena pembangunan manusia yang baik akan memaksimalkan faktor produksi. Terdapat hubungan yang erat antara indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan yang tinggi akan mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pembangunan manusia tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan yang saling terkait dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. UNDP (*United Nations Development Programme*) mengungkapkan bahwa pembangunan manusia dapat berkelanjutan jika didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Meskipun kedua hal tersebut tidak berkaitan secara langsung, namun jika kedua hal tersebut disatukan dalam suatu kebijakan pembangunan yang searah akan tercipta suatu kekuatan yang akan dapat saling mendorong sehingga pertumbuhan ekonomi sangat efektif dalam meningkatkan pembangunan manusia (Sari et al., 2020:77).

Tabel 1.4
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
Tahun 2019-2023 (%)

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Kerinci	70,03	70,59	70,95	71,21	71,45	70,85
Merangin	68,3	68,81	69,07	69,19	69,53	68,98
Sarolangun	69,03	69,41	69,72	69,86	70,25	69,65
Batang Hari	68,92	69,33	69,67	69,84	70,11	69,57
Muaro Jambi	67,86	68,34	69,01	69,18	69,55	68,79
Tanjung jabung Timur	62,61	63,32	63,92	64,43	64,91	63,84
Tanjung jabung Barat	66,15	67,13	67,54	67,54	68,16	67,30
Tebo	68,16	68,67	69,02	69,14	69,35	68,87
Bungo	69,04	69,42	69,86	69,92	70,15	69,69
Kota Jambi	76,74	77,41	78,26	78,37	79,12	77,98
Sungai Penuh	73,75	74,67	75,36	75,42	75,7	74,98

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2024

Berdasarkan tabel 1.4 perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi Jambi berfluktuasi disetiap tahunnya. Pada tahun 2022 perkembangan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi Jambi terendah sebesar 0,22% dan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi Jambi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,87% dengan rata perkembangan meningkat sebesar 0,69%.

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara keempat dengan penduduk terbanyak di dunia, tentunya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi per kapita. Penduduk disini maksudnya adalah semua orang yang secara de facto berada pada suatu wilayah tanpa mempertimbangkan status nya sebagai warga negara atau bukan (World Bank, 2015). Pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi sendiri selalu terkait dengan jumlah penduduk.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, pada tahun 2010 jumlah penduduk Jambi sebanyak 3.092.265 jiwa atau hanya 1,30% dari total penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk di Provinsi Jambi dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan peningkatan yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, hingga tahun 2023 jumlah penduduk di Provinsi Jambi mencapai 3.785.119 jiwa. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan ada tantangan ataupun masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Adapun tantangan dan masalah yang muncul dalam pertumbuhan jumlah penduduk adalah masalah ekonomi yang rentan terhadap kemiskinan, angka partisipasi sekolah, penyediaan lapangan kerja serta kepadatan penduduk (Mu'awwanah et al, 2022:88).

Tantangan bidang ekonomi dapat dilihat diantaranya, semakin bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan untuk setiap individu akan semakin bertambah juga, hal ini menjadikan tingkat kebutuhan semakin tinggi yang tentunya harus diiringi oleh persediaan agar tidak mengalami kelangkaan yang disebabkan bertambahnya penduduk (Umirin, 2022:111). Kemudian tantangan bidang ekonomi dapat juga terjadi pada kondisi sosial ekonomi yang rendah, hal ini berdampak pada angka partisipasi sekolah, jika semakin banyak orang miskin maka angka partisipasi sekolah akan menurun karena masyarakat miskin memiliki sumber daya yang lebih rendah untuk menempuh jenjang pendidikan, begitu pula sebaliknya (Elfarabi, 2018:102).

Pemerintah harus bisa menciptakan pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi bisa dilakukan dengan cara membuat atau

menciptakan lapangan pekerjaan didaerah pedesaan dengan menyebarkan perusahaan besar di setiap daerah, membangun sarana dan prasarana yang merata seperti sekolah, jalan dan lain-lain. Adapun faktor yang menjadi penyebab dalam pertumbuhan jumlah penduduk adalah faktor kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan migrasi. Kelahiran (fertlitas) menjadi salah satu faktor demografi yang mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk, fertilitas yang tinggi ataupun rendah akan mempengaruhi jumlah pertumbuhan penduduk.

Fertilitas akan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor demografi dan faktor non demografi, faktor demografi antara lain usia, umur perkawinan pertama, lama perkawinan dan jumlah persalinan yang pernah dialami. Sedangkan faktor non demografi antara lain ekonomi penduduk, tingkat pendidikan dan pekerjaan wanita (Mantra, 2015:115). Pendataan penduduk yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali membuat waktu perhitungan tingkat pertumbuhan penduduk akan menumpuk sedangkan pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai terobosan kegiatan dan kemampuan untuk melakukan prediksi laju pertumbuhan penduduk, karena dengan kemampuan untuk memprediksi pertumbuhan penduduk dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan pembagian porsi anggaran untuk mendukung kebijakan yang diambil dalam meminimalisir permasalahan yang ditimbulkan dari lajunya pertumbuhan jumlah penduduk. Berikut jumlah penduduk di Kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2019-2023.

Tabel 1.5
Data Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
Periode 2019-2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Kerinci	238,7	250,3	251,9	253,9	255,1	249.98
Merangin	388,9	354,1	355,7	357,6	368,4	364.94
Sarolangun	301,9	290,1	293,6	298,1	302,2	296
Batang Hari	272,9	301,7	306,7	313,2	312,7	301.44
Muaro Jambi	443,4	402,0	406,8	412,8	418,8	416.76
Tanjung jabung Timur	220,0	229,8	231,8	232,2	236,7	230.1
Tanjung jabung Barat	333,9	317,5	320,6	324,5	330,5	325.4
Tebo	354,5	337,7	340,9	344,8	350,8	345.74
Bungo	374,8	362,4	367,2	373,3	376,4	370.82
Kota Jambi	604,7	606,2	612,2	619,6	627,8	614.1
Sungai Penuh	90,9	96,6	97,8	99,2	99,8	96.86

Sumber: BPS, Provinsi Jambi 2025

Berdasarkan pada tabel 1.5 diatas bahwa dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dari masing-masing kabupaten/kota. Dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh memiliki jumlah penduduk yang paling rendah bila dibanding dengan 10 Kabupaten/Kota lainya. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu Kota Jambi. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kelahiran, pembangunan infrastruktur yang memadai dan banyaknya penduduk dari berbagai daerah yang bermigrasi ke kota dalam mencari ekonomi yang lebih baik. Kenyataan inilah yang menarik untuk dikaji, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan jumlah penduduk dan disparitas pembangunan dimasing-masing Kabupaten/Kota tersebut.

Untuk mengetahui potensi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Agar dapat memenuhi kriteria luas dan strategis tersebut, maka

pelaksanaan pembangunan harus diawali untuk berdasarkan prioritas dan pemilihan sasaran-sasaran yang mempunyai nilai strategis dan memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan citra Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan strategi - strategi apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul berikut: **"Pengaruh Belanja Modal Jumlah Tenaga Kerja Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Periode 2019-2023"**

1.2 Indentifikasi Masalah

Indentifikasi masalah pada penelitian ini, diantaranya:

1. Rata – rata perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam 5 tahun terahir menurun sebesar 291,89%.
2. Rata – rata perkembangan belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam 5 tahun terahir meningkat sebesar 2,28%.
3. Rata – rata jumlah tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam 5 tahun terahir meningkat sebesar 1,73%.
4. Rata – rata indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam 5 tahun terahir meningkat sebesar 0,58%.
5. Rata – rata jumlah penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam 5 tahun terahir meningkat sebesar 0,38%.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Belanja Modal, Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk secara simultan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Pengaruh Belanja Modal, Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan dan Jumlah Penduduk Manusia secara parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Modal, Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk secara simultan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Modal, Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk secara parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi Pengembangan pengetahuan tentang pembangunan ekonomi dan bagi peneliti dapat menambah wawasan tentang determinan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi jambi.

2. Manfaat bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam menentukan kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi.